**BAB II**

# PERSENGKETAAN PERBATASAN KONFLIK INDIA-PAKISTAN MENGENAI MASALAH KASHMIR

# A. Konflik Kashmir

Nasib masyarakat Kashmir memang tak seindah sebutan tanah tumpah darahnya. Setiap berbicara tentang Kashmir, niscaya orang tak akan lupa bahwa Kashmir adalah “*a garden of eternal spring*”, Kashmir adalah “*an iron fort to a palace of kings*”. Bahkan, keindahan Kashmir telah terukir dalam catatan Maharaja Salim Jehangir, sejak 1620 lalu. Namun, hanya orang yang sempat mengunjungi Kashmir lah yang dapat melihat betapa kontras antara mitos keindahan tanah Kashmir dengan fakta kemuraman nasib masyarakatnya. Bahkan, seorang pejabat departemen luar negeri AS, Josef Korbel dalam karyanya berjudul *Danger In Kashmir* misalnya, menyebutkan bahwa sejarah Kashmir tak lebih sebagai sebuah derita tentang kesedihan (*The History of Sadness*).

Sebutan itu tidaklah berlebihan jika dilihat dari sejarah modern Kashmir, yakni sejak “dijualnya” wilayah Kashmir oleh kolonial Inggris kepada Raja Gulab Singh, seorang tuan tanah dari keluarga Dogra di Jammu seharga 750.000 pounds atau sekitar 7,5 juta rupee. Melalui Treaty of Amristar yang di tandatangani tahun 1846, Kashmir beserta Jammu berada dibawah kekuasaan raja Hindu. Itulah awal dari penderitaan politik-ekonomi-sosial budaya masyarakat kashmir hingga sekarang, pasca kolonial.

Dibawah pemerintahan keluarga Dogra, segala sesuatu dan setiap orang Kashmir dikenakan berbagai pajak. Bahkan, pada tahun 1944-1945 misalnya, dari pendapatan perkapita yang hanya 11 rupee (atau sekitar 3 dollar AS) 21 persennya diperuntukkan hanya untuk membayar pajak. Pada saat yang sama, dibidang sosial budaya (sejak tahun 1850) Maharaja Hindu tak kalah sengit untuk menekan Muslim Kashmir, dengan melancarkan program *Suddhi* atau Hinduisasi, yakni gerakan mengembalikan kaum Muslim kepada agama asli nenek moyang mereka yakni Hinduisme. Dalam kerangka yang sama, penyembelihan sapi oleh Muslim (binatang suci bagi hindu), tetapi halal dimakan bahkan dijadikan sembelihan korban bagi Muslim, dikenai hukuman sepuluh tahun penjara.

# Tabel I

Jumlah pengungsi Kashmir dan lokasinya di Pakistan (1990-Januari 2001)[[1]](#footnote-1)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Distrik | Kamp Pengungsian | **Jml Keluaga** | **Jml.Orang (jiwa)** |
| Muzaffarabad | 1. Ambore
2. Kamser
3. Heer kutli
4. Rara (Domishi)
5. Nikot (karka)
6. Manik-pian 1
7. Manik-pian 2
8. Kel
9. Hattian
10. Gabung pemukiman lokal

Total | 22322736841451013173451488**1.765** | 1.2711.5173105429167052.1672322841.760**9.704** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kotli | 1. Gulpur
2. Kotli sohlnan
3. Gabungan pemukiman lokal di kotli
4. Gabungan pemukiman lokal di Fatehfur

Total  | 1462835737**523** | 1.0161.692194159**3.061** |
| Mirpur | 1. Gabungan pemukiman lokal
 | 54 | 3.061 |
| Rawlakote | 1. Gabungan pemukiman lokal di Madarpur
 | 13 | 111 |
| Total Semua |  | **3.021 KK** | **16.982 jiwa** |

**Catatan:**

1. Jumlah pengungsi tahun 1947 : 1.500.000 jiwa.s
2. Jumlah pengungsi tahun 1965 dan 1971 : 9.880 KK atau 50.000 jiwa.
3. Jumlah pengungsi yang taj terdaftar sejak 1990 : 35.000 jiwa.
4. Masuk wilayah LOC sampai Januari 2001 : 371.729 jiwa.

Berbagai tanggapan minor oleh kaum Kashmir atas kebijakan diskriminatif dan memaksa, ditanggapi rezim Dogra dengan pengangkapan dan pemenjaraan. Tak berlebihan jika muncul pemberontakan yang silih berganti, bahkan terus berlangsung sampai saat Kashmir menjadi wilayah perebutan Pakistan-India tahun 1947.

Ketika trend di lingkungan Kashmir menghendaki penggabungan kepada pakistan (1947), tentara Dogra yang didominasi kaum Hindu dan Sikh makin sadis membantai Muslim Kashmir. Fakta ini memancing suku-suku di pakistan yang berbatasan dengan Kashmir untuk menggelorakan semangat jihad guna melawan para pembantai saudara Muslim mereka di Kashmir. Dengan cepat mereka berhasil menduduki Muzaffarabad dan Uri. Di Jammu mereka malah bergabung dengan kaum revolusioner Azad dan didukung para sukarelawan asal Punjab Barat. Moment inilah yang akhirnya dimanfaatkan Maharaja Hindu, Harry Singh, untuk meminta bantuan India yang akhirnya sekaligus menetapkan penggabungan Kashmir dalam rengkuhan India pada 27 Oktober 1947, serta menandai awal perseteruan India-Pakistan yang tak ada ujungnya.

Kemelut Kashmir akhirnya memancing PBB untuk campur tangan. Isu Kashmir inilah yang akhirnya menjadi problema tertua dalam agenda Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam kerangka itu, PBB membentuk suatu komisi yang terkenal dengan nama *the United Nation Comission for India and Pakistan* (UNCIP) guna menyelesaikan Kashmir secara damai. Melalui lembaga ini telah dikeluarkan dua resolusi yang fundamental tentang Kashmir yakni tanggal 13 Agustus 1948 dan 5 Januari 1949. Intinya, kedua resolusi memberi garansi bahwa “pertanyaan apakah wilayah Jammu dan Kashmir akan bergabung kepada Pakistan atau India akan diputuskan oleh rakyat Jammu-Kashmir sendiri melalui metode demokratis yakni plebisit yang bebas dan menyeluruh dibawah pengawasan PBB” (Tabel 2)

**Tabel II**

**Beberapa cuplikan Resolusi PBB tentang Kashmir**

“…Nothing With satisfaction that both India and Pakistan desire that the question of accession of Jammu and Kashmir to India or Pakistan should be decided through the democratic method of a free and impartial plebicite, considering that the continuation of the dispute is likely to endanger international peace and security. Recommends to the goverments of India and Pakistan the following measure as those wich in the opinion o the council are appropriate to biring about a cessation of the fighting and to create proper condition for a free and impartial plebiscite to decide whether the state of Jammu and kashmir is to accede to India or Pakistan. The Government of India should undertake that there will be established in Jammu and Kashmir a Plebiscite administration to hold a Plebiscite as soon as possible on the question of the accesion of the State to India or Pakistan. (Resolusi 47 (1948) pada pertemuan ke 286 DK PBB, 21 April 1948).

**Tabel 2:** Beberapa cuplikan Resolusi PBB tentang Kashmir (1990-Januari 2001)

“The Government of India and the Government of Pakistan reaffirm their wish that the future status of the state of Jammu and Kashmir shall be determined in accordance with the will of the people and to that end, upon acceptence of the truce Agreement both Gobernment agree enter into consultation with the comission to determine fair and equitable conditions whereby such free ecpression will be assured” (Resolusi The United Nations Comission for India and Pakistan (UNCIP), 13 Agustus 1948.

‘The Question of the acccession of the State of Jammu and Kashmir ti India or Pakistan will be decide through the democratic method of free and impartial plebicite”. (Resolusi pertemuan UNCIP, 5 Januari 1949).

Reminding the Government and authorities concerned of the principle embodied in its resolutions 47 (1948) of 21 April 1948, 51 (1948) of 3 June 1948, 80 (1950) of March 1950 and 91 (1951) of March 1951, and the United Nations of Commission for India and Pakistan resolution of 13 August 1948 and 5 Januari 1949, that the final disposition of the State Jammu and Kashmir will be made in accordance with the will of the people epressed through the democratic method of a free and impartial plebiscite conducted under the auspices of the United Nations. (Resolusi 122 (1957) DK PBB, 24 Januari 1957)

Berbagai resolusi itu diterima dengan baik oleh India maupun Pakistan.

Bahkan, usul campur tangan PBB serta pemberian hak pada rakyat Kashmir untuk menentukan nasibnya sendiri (*right of self determination*) adalah bagian dari usul PM India, Pandit Jawaharlal Nehru sendiri. Pada 21 November 1947 misalnya, Nehru secara tegas menyatakan: “*I have repeatdly stated that as soon as the raiders have been driven out of Kashmir or have withdrawn, and peace and order have been established, the people of Kashmir should decide the question of accession by plebicite or referendum under international auspicies such as those of the United Nations* = “Saya telah menyatakan berulang kali agar para penyusup hendaknya segera dikeluarkan atau keluar sendiri dari Kashmir, sehingga perdamaian dan ketertiban dapat diwujudkan. Orang-orang Kashmir harus memutuskan sendiri melalui plebisit (referendum) dibawah pengawasan internasional seperti PBB.” Selain pernyataan itu masih banyak lagi pernyataan atau janji pemerintah India yang akan menentukan status Kashmir melalui plebisit. Namun nyatanya janji tersebut tak pernah di tepati, dan rakyat Kashmir tidak pernah memperoleh haknya untuk menentukan nasib sendiri melalui referendum. Hingga di awal milenium ketiga dan atau awal abad 21 rakyat Kashmir yang diduduki India senatiasa menanti penyelesaian problem Kashmir secara damai seperti termaktub dalam resolusi PBB sebagai kesepakatan India-Pakistan, yakni referendum.

Seorang penulis asal Inggris, Sir Frediric Bennet dalam tulisannya berjudul *Experts from Kashmir Today* menyebutkan beberapa alasan kenapa PBB gagal menyelesaikan persoalan Kashmir berdasarkan resolusi yang dibuat DK lewat plebisit, antara lain:

*Pertama*, adanya faktor kepentingan nasional berbagai kekuatan besar seperti negara-negara anggota tetap DK PBB baik dari perspektif ekonomi maupun strategis. (1). Soviet berkepentingan menjaga agar India tetap menjadi sekutunya dalam konteks politik regional dan globalnya sebagai sebuah kaunter rasional terhadap strategi global AS. Oleh karena itu Soviet berada dibelakang India dalam permasalahan Kashmir. (2). AS memanfaatkan pakistan sebagai patner gepoliknya di Asia Selatan. Dengan tetap eksisnya problema kashmir, maka pakistan tetap merasa berkepentingan untuk berpelindung pada AS. Dalam konteks konstelasi ini pula kendati AS tetap memerlukan Pakistan sebagai teman dekat namun tak berkehendak memaksa New Delhi, karena sudah pasti akan memancing konflik bersenjata melawan patron New Delhi yakni Soviet. (3). Dalam konstelasi ini Cina akhirnya berkepentingan terhadap Pakistan guna mengimbangi persaingan internal Ideologi komunisnya terhadap Soviet. Dalam perspektif inilah Soviet membiarkan problema Kashmir berlanjut sehingga manghadapkan India pada ancaman dua front yakni perbatasan India-Cina (dalam soal Ladakh) disamping konflik India-Pakistan, sehingga merasa perlu berlindung pada Soviet.

*Kedua*, Inggris yang seharusnya menjadi pihak yang paling bertanggung jawab terhadap nasib Kashmir juga punya kepentingan lebih besar terhadap India dibanding Pakistan, karena: (1). Peluang ekonomi perdagangan India lebih strategis dan menarik dibanding Pakistan. (2). Pemerintaha sosialis India pasca PD II (partai kongres) lebih dekat secara emosional dan ideologis terhadap pemerintahan partai buruh Inggris. Sebaliknya, Inggris cenderung antipati pada pemerintahan konservatif Pakistan disamping munculnya rezim militer. Pertimbangan ekonomi tampaknya pula melandasi Prancis untuk tak terlalu antusias memaksa India melaksanakn resolusi PBB. Akibat kepentingan masing-masing tadi, akhirnya tak satupun dari the Big Five (AS, Uni Soviet, Cina, Inggris dan Prancis) dalam PBB mempunyai semangat dan itikad yang kuat dalam menyelesaikan problema Kashmir dengan cara bersikap keras pada India.

*Ketiga*, dalam tahap tertentu negara-negara lain di berbagai belahan dunia, besar maupun kecil, tampaknya juga mempunyai kepentingan yang hampir sama terhadap India dimana kerjasama ekonomi dan perdagangan dengan India dan bukan Pakistan dinilai lebih menjanjikan, mengingat India lebih luas wilayahnya, lebih banyak dalam sumber daya alam, maupun lebih dari pangsa pasar (penduduk) nya. Atas dasar pertimbangan ekonomi ini, mereka, bahkan termasuk sebagian negara Muslim anggota OKI (kendati secara nurani pro Kashmir), tetapi mereka hanya tertarik untuk memainkan peran dengan memberi dukungan dibalik layar terhadap prinsip-prinsip penentuan hak (*self-determination*). Pada hak seperti itu secara jelas dijamin oleh Atlantic Charter yang di tanda tangani Wiston Churchill (Inggris), Franklin Roosevelt (AS), Jenderal De Goule (Prancis), Joshep Stalin (Soviet) serta menjadi landasan sendiri bagi Piagam PBB sendiri.

Setelah perang dingin berakhir, pertimbangan ekonomi tampaknya kian menonjol. Apalagi AS dan sekutunya juga dihadapakan pada kalkulasi lain berupa lahirnya ancaman perang nuklir, sehingga negara-negara super power yang di motori AS tak mau mengambil resiko dengan memaksa India untuk mengimplementasikan resolusi PBB. Sebab, pemaksaan semacam ini dapat menimbulkan kenekatan India untuk menggunakan nuklirnya.

Alhasil, hak rakyat Kashmir akhirnya tidak berhasil dipenuhi oleh PBB, kendati hal itu telah dijanjikan sejak tahun 1948 lalu. Bahkan bukan haknya yang tak terpenuhi, masyarakat Kashmir pada perkembangan waktu justru terperangkap pada posisi kenestapaan:[[2]](#footnote-2)

1. Kashmir senantiasa menjadi ajang persaingan (rivalitas) dua negara disisi kiri kanannya, India-Pakistan. Dengan posisi di tengah-tengah antara dua negara berseteru, telah menempatakan rakyat dan harta Kashmir menjadi korban paling utama.
2. Selama puluhan tahun tanah dan rakyat Kashmir terkoyak-koyak akibat menjadi rebutan India dan Pakistan. Total luas Kashmir yang diperebutkan lebih dari 80.000 kilometer persegi. Kini sepertiga wilayah Kashmir dikuasai Pakistan secara efektif telah terasimilasi, atau bahkan secara tak tercatat telah menjadi propinsi kelima bagi pakistan. Dalam persoalan ini Pakistan secara langsung menangani administrasi Azad Kashmir sejak awal 1950 an. Pejabat level kabinet, menteri urusan Kashmir bertanggung jawab terhadap wilayah ini.

Sedangkan India menetapkan Kashmir sebagai negara “bagian Kashmir” yang berstatus khusus. Status ini didasarkan pada konstitusi article 370 yang berisi larangan bagi pendatang non-Kashmir untuk memiliki kekayaan yang tak bergerak seperti tanah dan rumah di wilayah Kashmir. Kebijakan yang bernuansa perlindungan bagi kemurnian wilayah Kashmir khusus bagi orang Kashmir dimaksud untuk menarik perhatian masyarakat setempat. Selain strategi konstitusi, Kashmir juga dapat dikendalikan melalui jaring pemerintahan Kashmir pro New Delhi, seperti melalui pelaksanaan pemilu lokal tahun 1951. pemilu ini dimenangkan oleh Syeikh Abdullah, seorang politisi Kashmir National Conference yang lebih pro India dan memilih Kashmir sekuler. Ketika Abdullah tak cukup loyal pada kepentingan New Delhi, maka tahun 1953 Letnan Bakhsi Ghulam Mohammad atas dukungan India mengambil alih kontrol partai dan pemerintah, akibat pengkoyakan sebuah wilayah Kashmir menjadi dua secara terpisah ini telah menyebabkan saudara terpisah dari saudara, bahkan terusir dari tumpah darahnya, serta tercabut dari akar-akar kulturalnya.

1. Terutama Kashmir India akhirnya menjadi obyek pemerasan dan penindasan pemerintahan New Delhi yang sejak awal 1990an telah didominasi kaum nasionalis Hindu. Prinsip dasar pemerintahan nasionalis Hindu yang berakar dari ajaran *Jana Sangh* ataupun *Rastrya Swayam Sevakhsangh* (RSS) ini adalah sebuah kecurigaan kaum Hindu terhadap loyalitas dan nasionalisme kaum Muslim, apalagi terhadap Muslim Kashmir yang masih bermasalah. Pola pikir politik yang berlandas pada prejudice model ini akhirnya menimbulkan pola kebijakan politik yang refresif oleh New Delhi terhadap Kashmir.

Perlu dicatat bahwa pada tahun 1950 an dan tahun 1960 an pemerintah India melakukan manipulasi politik dengan menjadikan Kashmir sebagai wilayah otonomi dibawah New Delhi. Tahun 1986 Rajiv Gandi bersama Kepala Menteri Jammu Kashmir membuat persetujuan semu, yang akhirnya mendapat kritik secara luas dari masyarakat sebagai berlawanan dari aspirasi masyarakat kashmir rezim boneka new Delhi ini akhirnya dibubarkan seiring dengan tuduhan yang sangat luas tentang korupsi yang dilakukan oleh partai *National Conference* pimpinan Furooq Abdullah. Sebuah partai oposisi baru, *Muslim United Front* (MUF) yang terutama didukung aktivis pro kemerdekaan, muslim fundamentalis, dan kaum muda Kashmir yang frustasi akibat kemiskinan, memang bersedia terlibat dalam pemilihan 87 anggota parlement Kashmir. Namun, kecenderungan dalam pemilu begitu meluas, para kandidat MUF banyak yang ditahan, sehingga pemilu menimbulkan kemelut politik baru, serta mendorong masyarakat kian tertarik untuk menjadi pendukung kelompok-kelompok militan termasuk kelompok yang sangat kuat, *Hezbul Muhajidin*. Bahkan, setelah pemilu kelompok JKLF dan kelompok-kelompok lainnya justru mulai melancarakan serangan bersenjata pada pemerintah, melakukan pengeboman terhadap gedung-gedung pemerintah, mobil dan rumah-rumah para pejabat dan mantan pejabat pemerintah, serta memboikot pemilihan anggota parlemen pada 1989.

Karena tak populer, maka pemerintahan hasil pemilu 1989 manjadi tidak efektif, maka pada Februari 1990 parlemen Kashmir dibubarkan dan sejak Juli 1990 Kashmir yang semula dikendalikan Gubernur (Governor’s rule) diambil alih untuk dikendalikan pemerintah pusat (Presiden Rule). HL ini sesuai konstitusi Jammu dan Kashmir pasal 370 yang menyatakan bahwa pemerintah parlementer dapat di buabarkan dan pemerintahan dikendalikan Gubernur selama 6 bulan. Berikutnya, selama satu tahun pemerintahan dapat dikendalikan pemerintah pusat (Presiden). Sejak saat itulah politik prejudise New Delhi terhadap Kashmir digerakkan dengan mesin militer pusat.

Ditengah kenestapaan itu rakyat Kashmir mulai membangun gerakan perlawanan (terutama sejak awal 1990), persis seperti yang pernah dilakukan leluhurnya ketika melawan Raja Gulab Singh dari keluarga Hindu Dogra. Dari sejarah dan akar permasalahan Kashmir tadi terlihat jelas bahwa yang dituntut rakyat Kashmir sebenarnya bukan sebuah angan-angan kosong, melainkan menuntut apa yang telah dijanjikan Pakistan-India-PBB yakni: right of self determination (hak menentukan nasib sendiri (melalui plebisit atau referendum. Dari logika itu jelas sekali bahwa perjuangan rakyat Jammu-Kashmir hakekatnya bukan separatisme seperti yang dikampanyekan New Delhi, sebab rakyat Kashmir memang tak pernah merasa menjadi bagian India, sebagai mana PBB yang belum pernah mengakui Kashmir merupakan bagian Integral India.

Dari sisi ini terlihat bahwa terutama dua pertiga Kashmir yang diduduki India proses Integrasinya ternyata juga mengalami kendala dan selalu berpersoalan. Bahkan, sejakJanuari 1990 muncul pemberontakan dari lembah Kashmir. Peristiwa ini sekaligus sebagai refleksi dari spirit baru masyarakat Kashmir tentang militansi, sebagai penyimpangan dari gaya pasif yang sebelumnya lebih dominan. Namun, dengan menguasai media massa, pemerintah India berhasil memanipulasi dan menjungkirbalikkan opini dunia bahwa Kashmir yang berjuang menuntut haknya disebut sebagai gerakan separatis. Kashmir yang membela diri dan melakukan perlawanan atas penindasan dan kesewenang-wenangan oleh rezim India disebut sebagai teroris, sebagian rakyat sipil Kashmir yang menjadi korban mesin-mesin intelejen New Delhi justru diputarbalikan sebagai kaum militan Kashmir sendiri. Penyanderaan para wisatawan asing yang hakekatnya dilakukan oleh mesin rekayasa pemerintah New Delhi, dosa-dosanya ditimpakan kepada pejuang kashmir.

Cerita tentang kesedihan (*the history of the sadness*) rakyat Kashmir sebenarnya tidak bisa lepas dari kesalahan dan atau tanggung jawab kolonial Inggris. Bahkan, sebagian ahli sejarah termasuk sejarawan Inggris sendiri semisal Alastair Lamb misalnya, justru menemukan bukti-bukti dan atau argumentasi bahwa Inggris lah sebagai pihak yang paling berdosa terhadap kenestapaan rakyat Kashmir. Alasannya, karena:

1. Inggris telah meninggalkan wilayah itu dalam situasi ketergesaan di tengah proses partisi yang belum tuntas.
2. Terjadi keberpihakan Gubernur Jenderal Lord Mounbatten pada India, yang hakekatnya bertentangan dengan aspirasi rakyat Kashmir.

Perlu dicatat bahwa sampai 14 Agustus 1947 sebenarnya tidak ada sengketa wilayah di sub kontinen India. Sengketa wilayah timbul seketika pemerintah Inggris di bawah Pimpinan PM Clament R. Atlee secara tegesa-gesa melakukan kebijakan dekolonisasi atas wilayah-wilayah koloninya termasuk India. Hal ini dilakukan akibat Inggris mengalami krisis keuangan, sehingga tak memungkinkan lagi untuk membiayai pemerintahan kolonialnya. Akibat ketergesaannya itu, maka dalam soal pengaturan dan atau persiapan pemerdekaaan wilayah-wilayah jajahannya tak diatur secara baik, sehingga menimbulkan benih-benih konflik yang siap meletus.

Dosa kolonial Inggris bahkan kian besar jika dikaitkan dengan sikap Gubernur Jenderal Inggris di India yang terakhir yang bernama Lord Mounbatten yang dianggap mempunyai kecenderungan membela atau pro India. Argumentasinya adalah:

*Pertama*, ada analisis spekulatif bahwa eksistensi *Instrument of Accession* dan surat dari Maharaja Harry Singh adalah rekayasa yang melibatkan Mounbatten. Sejarahwan Inggris Alastair Lamb misalnya menganalisis: adalah tidak mungkin surat itu ditandatangani tanggal 26 Oktober 1947, melainkan pada 27 Oktober 1947 atau pada saat intervensi tentara India terjadi. Jika hal itu benar, adalah sangat memungkinkan penandatanganan dokumen itu ada dibawah tekanan, yang berarti pula cacat hukum. Dalam konteks ini Mounbatten sangat patut diduga dalam proses rekayasa ini. Dugaan ini sangat beralasan, karena:

1. Selama 14 Agustus – 27 Oktober 1947 Harry Singh memperlihatkan sikap untuk tak memilih India ataupun Pakistan.
2. Tanggal 26 Oktober 1947 Harry Singh sedang dalam perjalanan dari Srinagar ke Jammu. Sementara itu Perdana Menteri Jammu-Kashmir (M.C. Mahajan) sedang berunding dengan petinggi India bidang Kashmir (v.p. Menon) di New Delhi sampai tengah malam 26 Oktober 1947. Oleh karena itu, kalaupun Mahajan dan Menon terbang ke Jammu, secara rasional baru akan sampai di pagi hari, 27 Oktober 1947, tepat pada hari terjadinya Invasi India atas Kashmir. Berdasarkan Fakta Ini adalah sangat mustahill bahwa dokumen itu ditandatangani pada 26 Oktober 1947.

*Kedua*, ketika terjadinya konflik bersenjata untuk pertama kali dalam memperebutkan Kashmir (1947) Ali Jinnah sebenarnya usul kepada Mounbatten agar diselenggarakan sebuah plebisit di bawah pengawasan bersama. Tetapi usul ini di tolak Mounbatten, sambil mengusulkan agar plebisit diawasi oleh PBB. Hal ini mempunyai implikasi negatif bagi penyelasaian Kashmir, karena dengan memasukan Kashmir kedalam agenda PBB, maka penyelenggaraan plebisit semakin rumit, karena harus melibatkan masyarakat Internasional, melalui beberapa tahap dan prosedur serta perundiangan yang bertele-tele. Hal ini akan sangat memakan waktu, sehinga memungkinkan India untuk melakukan berbagai rekayasa politik untuk menunda dan terus menunda. Dugaan adanya rekayasa Nehru-Mounbatten sangat beralasan, karena:

1. Dalam kasus Junagadh plebisit di izinkan dilaksanakan, tetapi kepada Kashmir justru di tentang. Padahal, jika orientasinya adalah untuk melihat aspirasi rakyat Kashmir, cara Junagadh justru yang terbaik, sebab plebisit berlangsung cepat, sederhana dan damai dibawah pengawasan India, mengingat mayoritas rakyat Junagadh adalah Hindu namun penguasaanya Islam. Bila cara yang sama dilakukan Kashmir yang mayoritas penduduknya Islam, tetapi pengusaanya Hindu, maka pengawas pelaksanaan plebisit Kashmir adalah Pakistan. Jika hal ini dilaksanakan sudah hampir pasti hasilnya akan dimenangkan Pakistan. Kemungkinan inilah yang tampaknya disabot Mounbatten.
2. Dugaan kongkalikong Mounbatten-Nehru kiat kuat mengingat keduanya sudah lama bersahabat, bahkan ketika Mounbatten masih bertugas di Singapura. Pada Maret 1946 (setahun sebelum menjadi Gubernur Jendral di India) dia pernah mengundang Nehru berkunjung ke Singapura, bahkan menyambutnya dengan penghormatan besar.

Oleh karena itu, kalaupun toh analisis pertama tentang rekayasa eksistensi *Instrument of Accession* dan dari Maharaja Harry Singh keliru, yang pasti analisis kedua telah menempatkan pemrintah kolonial Inggris, apalagi Mounbatten, sebagai pihak yang paling berdosa. Karena akibat keberpihakan Mounbatten yang bertentangan dengan aspirasi rakyat Kashmir itu telah menempatkan Rakyat Kashmir pada situasi kenestapaan berkepanjangan.

Kashmir sebagai wilayah yang mendapat otonomi penuh dari Inggris sebenarnya secara defacto menginginkan bergabung ke Pakistan atas dasar prinsip pemisahan India – Pakistan, yakni mendirikan negara bagi Muslim di anak benua India. Aspirasi ini seperti tercermin dari kecenderungan sikap Konferensi Muslim sebagai partai terbesar dalam parlemen Kashmir yang dalam pemungutan suara Juli 1947 meminta Maharaja untuk bergabung dengan Pakistan. Ekspresi pro Pakistan makin kental terlihat dari kemerdekaan Pakistan 14 Agustus 1947, dimana penduduk Kashmir bergembira merayakan penggabungan dengan Pakistan, dengan cara mengibarkan bendera Pakistan di seluruh Kashmir.

Namun Maharaja Hindu, Harry Singh, yang berkuasa saat itu menolak bergabung dengan India maupun Pakistan. Bahkan, disaat perayaan kemerdekaan itu pemerintah kerajaan mengambil tindakan keras termasuk dengan menutup surat kabar pro Pakistan serta menetapkan undang-undang darurat. Sikap Harry Singh ini memancing kemarahan rakyat Kashmir, sehingga melancarkan berbagai aksi protes dan kerusuhan dengan dipimpin Abdul Qoyyum (yang belakangan menjadi PM Azad Kashmir). Namun, pemerintah kerajaan justru melakukan pembumihangusan sejumlah desa-desa Muslim.

Situasi ini menimbulkan kemarahan suku-suku Muslim disekeliling Jammu Kashmir yang lantas melakukan gerakan solidaritas dengan berbondong-bondong memasuki wilayah Kashmir untuk membantu Muslim Kashmir yang tertindas. Sementara itu, pemerintah Pakistan selain melancarkan blokade ekonomi terhadap wilayah yang secara ekonomi lebih terkait dengan Pakistan, suku-suku di Pakistan juga memberikan dukungan militer pada aksi protes yang dilakukan Rakyat Kashmir. Dukungan militer yang dilakukan pada 3 September 1947 ini berhasil menduduki Srinagar pada 24 Oktober 1947.

Akibat merasa terdesak oleh situasi tadi, Harry Singh lantas memunta dukungan India, bahkan juga terpaksa membuat “persetujuan penggabungan” Kashmir dalam pemerintahan New Delhi yang ditanda tangani pada 26 Oktober 1947. sebagai Konsesi, India esok harinya (27 Oktober) mengirim bantuan termasuk angkatan udaranya untuk menghentikan aksi penyerbuan ke Kashmir. Akhirnya terjadilah perang India-Pakistan untuk yang pertama. Peristiwa ini memaksa PBB untuk turun tangan, menengahi, hingga lahirlah resolusi PBB yang menetapkan bahwa status Kashmir hendaknya ditentukan melalui plebisit. Sebagai pelengkap resolusi PBB yang dikeluarkan pada 1948 dan 1949, India menyatakan bahwa pendudukannya di Kashmir hanya untuk menstabilkan kawasan dan bila sudah stabil, referendum hak wilayah di Kashmir segera dilaksanakan. Namun, hal itu ternyata tidak kunjung direalisir.

Bahkan, langkah-langkah politik yang di ayunkan India pada tahun-tahun berikutnya memperlihatkan itikad tidak baiknya. Majelis Konstituante Jammu-Kashmir (boneka India) misalnya, pada 6 Februari 1954 meratifikasi pengintegrasian wilayah Kashmir kepada India. Pada 19 November 1956 lembaga yang sama juga menyetujui konstitusi yang menyatakan bahwa negara Jammu dan Kashmir merupakan bagian integral India. Pada 26 Januari 1957 India lantas merumuskan ketentuan pemindahan kekuasaan ini dan menyatakan bahwa ketentuan tersebut tak dapat diganggu gugat apalagi dibatalkan. Dapat diduga jika ketika Pakistan mengangkat isu Kashmir didepan dewan Keamanan PBB, 27 April 1962, India menegaskan bahwa pemindahan kekuasaan atas Kashmir sudah lengkap, sempurna dan final.[[3]](#footnote-3)

Sikap India inilah yang pada akhirnya merangsang meletusnya perang kedua India-Pakistan dalam soal Kashmir tahun 1965, kendati *triggering factor* (faktor pemicu) nya adalah akibat terjadinya pencurian benda pusaka yang tersimpan di masjid Hazratbal, Srinagat tahun 1963. pencurian tersebut memicu perseteruan akibat kecaman keras dari Islamabad. Bahkan, kemelut ini telah merangsang Pakistan menerapkan operasi Giblatar, dengan menempatkan sejumlah pasukan menyusup ke Kashmir India, membuat rusuh, sehingga memberi legitimasi Pakistan untuk turut campur dalam upaya menyelesaikan kemelut wilayah sengketa tadi. Lewat operasi gerak cepat ini, diharap dapat direbut beberapa wilayah penting di Kashmir. Namun, strategi Pakistan ini ternyata tidak berlangsung sukses, terutama karena kekuatan militer India memang lebih kuat. Alhasil, dua pertiga wilayah Jammu-Kashmir tetap dikuasai India, dan kenestapaan masyarakat Kashmir tetap berlanjut.

## Proses Dekolonisasi dan Pratisi India-Pakistan

Pemerintah Inggris pada saat itu mengalami kebangkrutan secara ekonomis yang menciftakan masa pratisi buat negara India-Pakistan. Pasca Perang Dunia ke II Pemerintah Inggris merencanakan segera menarik diri dari koloninya. Suatu rencana segera dibahas untuk penarikan secepatnya dari India, dalam proses dekolonisasi dan penentuan masa depan India itu terdapat tiga pihak, pemerintah kolonial Inggris sendiri, kalangan Hindu (yang terdiiri dari 300 juta penduduk pada saat waktu itu) dan kalangan Muslim (yang terdiri dari 100 juta penduduk pada waktu itu).

Dalam proses dekolonisasi dan pratisi India itu pemeran utamanya adalah seorang gubernur Jendral Inggris yang bernama Lord Mounbatten. Ia berteman akrab dengan pemimpin kongres India Jawaharlal Nehru sebelum bertugas di India. Mounbatten adalah seorang laksamana dan panglima tertinggi Tentara Inggris di Asia Tenggara yang berkedudukan di Singapura. Pada bulan maret 1946 (setahun sebelum ia mengambil alih gubernur Jendral India) Mounbatten mengundang Pandit Nehru ke Singapura. Nehru mendapatkan penghormatan besar disana sebagai pemimpin kongres dan sekaligus sebagai pemimpin Gerakan Kemerdekaan India.

Pada tanggal 22 Maret 1947, Mounbatten menjadi gubernur Jendral Inggris terakhir di India dan Ia di anggap sebagai pelican bagi penarikan pemerintahan kolonial dari anak benua tersebut. Ia adalah gubernur jendral Inggris terakhir di India dengan kekuasaan nyaris tak terbatas berkaitan dengan pengalihan kekuasaan kepada orang-orang India. Ia memajukan jadwal pengalihan kekuasaan tersebut yang semula bulan juni 1948 menjadi 15 Agustus 1947.

Sebenarnya terdapat konspirasi antara Lord Mounbatten dan Pandit Jawaharlal Nehru, yang mewakili kekuatan Inggris dan Hindu, untuk mencegah terbentuknya sebuah negara baru yang disebut Pakistan. Dalam berbagai pertemuan diantara Mounbatten dengan para pemuka *ALL India National Congr*ess dibahas mengenai hal tersebut dan mereka menyimpulkan bahwa pembentukan negara baru itu tidak layak dan tidak mampu bertahan lama.

Namun manuver-manuver dan gerakan-gerakan politik untuk membentuk negara Pakistan (yang secara tegas mulai dirancang tahun 1940) terus bergulir dan menjadi sangat populer dan sangat kokoh. Kekuatannya tidak dapat diabaikan begitu saja. Pembentukan Pakistan secara mutlak harus diakui. Dan kemudian, ketika negara baru itu benar-benar terbentuk dilemparkan kedalam badai dengan tidak ada kesempatan untuk hidup. Ini memang cara paling baik untuk menghancurkan selama-lamanya gerakan politik yang mengupayakan sebuah negara terpisah bagi orang-orang Muslim.

Mounbatten mengumumkan rencana partisi pada tanggal 3 Juni 1947, yang menentukan pembagian wilayah anak benua India menjadi dua, India dan Pakistan, berdasarkan prinsip keagamaan. Mounbatten memisahkan propinsi-propinsi Bengali dan Punjab. Di Punjab sebuah koridor dari daerah mayoritas Muslim diberikan kepada India untuk memberinya sebuah jalur Hubungan Langsung dengan Kashmir. Satu jalan baru untuk menuju Kashmir dibuat secara diam-diam. Mounbatte pergi ke Kashmir secara tergesa-gesa pada 20-24 Juni 1947 untuk menekan Maharaja Harry Singh agar tidak menyatakan penggabungan dengan India atau Pakistan sebelum 15 Agustus 1947, pada saat pengalihan kekuasaan pada India dari Inggris. Dalam kunjungan itu juga Mounbatten berusaha membebaskan Seikh Abdullah, tokoh yang disebut-sebut sebagai “Suara Rakyat Kashmir”, yang dipenjarakan oleh Pemerintah Kerajaan. Seikh Abdullah baru di bebaskan pada akhir September 1947 sebelum drama penggabungan Kashmir dilancarkan pada pekan ke empat bulan Oktober 1947.

Ketika partisi itu diumumkan, india sesungguhnya sudah menjadi negara yang mapan dan fungsional. Sedangkan pada saat itu pakistan harus memulai segalanya dari awal, tak punya sekretariat, tak punya kantor-kantor, pendeknya serba kekurangan. Sementara itu dampak dari pemisahan dua komunitas (Hindu dan Muslim) yang mendadak itu mengarah pada bentrokan komunal yang meluas dan menimbulkan banyak korban.

Selama periode 3 Juni sampai 14 Agustus 1947 terjadi kesibukan luar biasa, dan para pendukung pembentukan negara pakistan, seperti yang telah ditentukan oleh persyaratan-persyaratan dalam partisi tersebut, segera menggabungakan diri. Sampai dengan tanggal tersebut, ketika Pakistan mengumumkan hari kemerdekaannya, hanya tinggal negara bagian Kashmir yang belum tergabung secara resmi meskipun secara teoritis dimana penduduknya mayoritas Muslim, harus segera diselenggarakan Plebisit yang di awasi pakistan untuk menentukan statusnya.

Kashmir adalah mayoritas penduduknya Muslim tetapi penguasanya adalah Hindu. Kasus seerupa terjadi di Hyderabad dan Junagadh, dimana penduduknya Hindu tetapi penguasanya adalah Muslim. Kedua daerah tersebut segera di serbi pasukan India dan diselenggarakan plebisit dengan pengawasan india sehingga kedua wilayah itub bergabung dengan India. Akan halnya Kashmir, wilayah itu tidak melakukan putusan sampai ada permohonan penangguhan waktu dari penguasannya kepada pemerintah pakistan. Penduduk Kashmir sendiri merayakan kemerdekaan pakistan dan mereka segera dihentikan oleh tentara kerajaan Kashmir dengan kekerasan, yang ternyata kemudian berkepanjangan. Dari sinilah tragedi Kashmir yang terkait dengan partisi India dan Pakistan dimulai.

## Kashmir faktor penyebab tidak terselesaikannya konflik India-Pakistan

Setelah kemerdekaan kedua negara, negara-negara dibawah kerajaan india diberi kebebasan untuk menggabungakan diri kepada india atau Pakistan. Hal ini hanya butuh persetujuan dari Gubernur Jenderal India atau Pakistan, sedangkan persetujuan rakyat tidak dipentingkan. Pembagian daerah kekuasaan, berdasarkan prinsip pertimbangan mayoritas agama seperti yang diinginkan Pakistan tetapi hanya terbatas pada daerah British India, sedang prinsip ini tidak berlaku pada negara-negara kerajaan yang di pimpin Maharaja India. Kekuasaan untuk menggabungkan diri berada di tangan penguasa. Hingga pada tanggal 15 Agustus 1947 seluruh negara bagian India telah menentukan penggabungan diri dengan Pakistan atau India, kecuali Junagarh, Hyderabad, Jammu dan Kashmir dengan alasan wilayah mereka yang luas, sehingga mereka mempertimbangkan diri dengan India. Jammu dan Kashmir belum menentukan penggabungan diri, Maharaja Hary Singh penguasa negara Jammu dan Kashmir sebelumnya telah mengadakan perjanjian penundaan penggabungan diri tersebut tanggal 12 agustus 1947, pada saat perjanjian penundaan penggabungan diri negara Jammu dan Kashmir di ajukan, India tidak menyetujui tetapi Pakistan menerima perjanjian penundaan penggabungan diri tersrbut pada tanggal 14 Agustus 1947, sehingga pada tanggal 15 Agustus 1947 negara Jammu dan Kashmir mendapat status Negara Independent namun harus memutuskan hubungan dengan India dan Pakistan. Penundaan ini membawa India dan Pakistan kearah konfrontasi militer sepanjang tahun 1948.

Setelah negara Jammu dan Kashmir mendapat status negara yang Independent, India dan Pakistan tidak menerima hal tersebut. India sebagai negara yang sekuler menginginkan negara Jammu dan Kashmir masuk sebagai bagian dari wilayah kekuasaan India atas persetujuan Maharaja Singh, karena pertimbangan dari Maharaja yang menganut agama Hindu yang ingin mempertahankan kekuasaannya, walaupun negara Jammu dan Kashmir penduduknya mayoritas beragama Islam bagi India tidak masalah karena India mengakui semua agama termasuk agama Islam. Sedangkan Pakistan yang merupakan negara agama sangat mengharapkan penundaan yang dilakukan negara Jammu dan Kashmir yang pada akhirnya merupakan awal dari penggabungan wilayah tersebut kedalam kekuasaan Pakistan, karena bagi Pakistan sudah seharusnya negara Jammu dan Kashmir yang mayoritas penduduknya beragama Islam menjadi bagian pakistan sebagai negara yang pembentukannya berdasarkan agama Islam.

Pakistan pada kelanjutannya banyak melakukan tekanan terhadap negara Jammu dan Kashmir dengan cara:

1. Menghentikan suplai bahan-bahan kebutuhan pokok untuk Kashmir agar Kashmir bergabung dengan Pakistan.
2. Infiltrasi bersenjata ke wilayah negara Jammu dan Kashmir dan markas operasionalnya di wilayah Pakistan.

Paksaan militer yang dilakukan Pakistan terhadap wilayah negara Jammu dan Kashmir semakin meningkat ke skala besar pada tanggal 22 Oktober 1947 dengan menggunakan suku-suku di sekitar wilayah negara Jammu dan Kashmir sehingga menyebabkan banyak korban. Hal ini membuat Maharaja Singh (1895-1961) meminta pemerintah India untuk memperkenankan negara Jammu dan Kashmir bergabung dengan India, hal ini dilakukan sebelum suku-suku disekitar wilayah negara Jammu dan Kashmir yang di perintahkan Pakistan menyerang daerah Srinagar. Tanggal 27 Oktober 1947, penggabungan wilayah negara Jammu dan Kashmir kedalam kekuasaan negara India diberitakan secara umum dan secara hukum, sehingga tentara India dapat kewilayah Jammu dan Kashmir untuk menghentikan penyerangan. Pada saat itu penyerangan dapat dihentikan oleh tentara India.

Hubungan India dan Pakistan banyak mengalami kesulitan karena kedua negara terlibat konflik yang mengarah pada keadaan perang sebanyak 3 kali, pada konflik pertama masalah agama adalah faktor penyebab utama dan masalah perebutan daerah perbatasan bagi kedua negara untuk menguntungkan strategi masing-masing negara menjadi penyebab kedua. Konflik pertama ini dikenal dengan masalah Kashmir yang berakhir pada tahun 1948 dalam perjanjian gencatan senjata yang diprakarsai Inggris di Rann dan Kutch. Tetapi dalam perkembangan selanjutnya hubungan India dan Pakistan tetap tegang dan masing-masing meneruskan klaimnya atas Kashmir. Ketegangan itu berkembang menjadi pertempuran dalam skala kecil disepanjang perbatasan kedua ngara. Akhirnya pada tanggal 5 Agustus 1965 perang kembali terjadi dengan di awali oleh masuknya tentara Pakistan ke wilayah Kashmir. Sedangkan konflik ketiga yang mengarah pada perang pada tahun 1971 bermula akibat perang saudara antara Pakistan Timur (gerakan separatis Bengali) dan Pakistan barat, dimana jutaan pengungsi dari Pakistan Timur mengarah ke India dan terjadi Insiden perbatasan, hal ini menyebabkan bergeraknya tentara India ke Pakistan Timur. Hasilnya adalah kemenangan yang cepat dapat diraih India dan berdirinnya Bangladesh di bekas wilayah Pakistan Timur. Pada konflik ketiga ini, campur tangan eksternal lebih terasa dibandingkan dengan konflik-konflik sebelumnya. Hal tersebut didukung dengan mengalirnya dukungan politik dari Amerika Serikat dan China pada Pakistan dan Uni Soviet pada India.

Masalah mengenai perbatasan wilayah Jammu dan Kashmir yang dipersengketakan oleh India dan Pakistan yang belum tuntas terselesaikan masih merupakan sumber ketegangan dalam hubungan India-Pakistan, walaupun kedua pihak telah berupaya menjalin hubungan yang lebih erat dan bersahabat, dimana India dan Pakistan telah mengadakan serangkaian perundingan yang membahas mengenai fakta non agresi yang diusulkan Pakistan maupun membahas usul India mengenai pembentukan komisi bersama, belum dapat meredakan ketegangan dalam hubungan kedua negara. Contoh adalah perjanjian Simla antara India dengan Pakistan.

Pembagian wilayah Kashmir bagi kedua negara dianggap tidak adil, India yang menguasai dua pertiga wilayah Kashmir yang seluas 138.430 kilometer persegi dan beribukota Srinagar serta berpenduduk enam juta merasa seharusnya India dapat mempertahankannya secara utuh. Sedangkan Pakistan yang menguasai sisanya yaitu seluas 83.806 kilometer persegi yang dikenal dengan Azad Kashmir (Kashmir merdeka) dengan ibukota Muzaffarabad yang memiliki jumlah penduduk 1,8 juta, juga merasakan hal yang sama. Bagi pakistan sudah seharusnya pakistan menguasai wilayah Kashmir karena mayoritas penduduk Kashmir beragama Islam.

Isu Kashmir adalah isu yang dapat membuat Eskalasi konflik kedua negara menuju peperangan, bila ada tindakan awal dari kedua negara yang membuat semakin besarnya persepsi ancaman bagi negara lainnya. Seperti pada percobaan nuklir yang dilakukan India pada tahun 1998, yang membuat persepsi ancaman Pakistan terhadap India semakin menjadi dan menganggap tindakan yang dilakukan India dilandasi karena keinginan untuk menguasai wilayah karena sumber segala masalah antara kedua negara adalah masalah Kashmir. Dari peristiwa ini Pakistan yakin keadaan negaranya terancam.

Dari awal terbentuknya Pakistan, musuh bebuyutan Pakistan adalah India, hal ini disebabkankarena setiap masalah yang dialami oleh Pakistan selau terkait dengan India, dan kekuatan India lebih besar dibandingkan dengan Pakistan. Sehingga dapat disimpulkan selama masalah Kashmir tidak dapat diselesaikan dan kedudukan India dikawasan Asia Selatan masih dominan makla persepsi Pakistan terhadap India akan selalu dinilai sebagai persepsi ancaman yang tentunya akan mengkhawatirkan bagi negara-negara sekitarnya apabila persepsi ancaman tersebut semakin dikembangluaskan menjadi suatu obrolan yang muatannya biasa-biasa saja, mengingat posisi Kashmir secara geografis sangat strategis untuk menjadikan ancaman bagi negara-negara tetangganya seperti: Afghanistan, Rusia, China, dan khususnya bagi Kawasan Asia Selatan itu sendiri. Sehingga wajar apabila negara-negara tersebut selalu menekan melalui himbauan atau diplomasinya agar India dan Pakistan selalu menahan diri dalam menghadapi konflik yang terjadi antar kedua negara nuklir tersebut karena hal itu bukan saja hanya akan menyengsarakan kedua negara itu sendiri tetapi ancaman terhadap kawasan yang lainnya pun selalu dibayangi kengerian yang berkepanjangan dan menggambarkan kehancuran yang fatal bagi India dan Pakistan apabila terjadi perang kembali karena masalah Kashmir.

1. Dhurorudin Mashad,”Kashmir Derita yang Tak Kunjung Usai”, April 2004, hlm.5. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ibid., hlm. 18. [↑](#footnote-ref-2)
3. K.Raman Pillai,India’s Foreign Policy,Basic Issues and Political Attitudes,(Meerut:Meenakshi Prakhasan, 1969),hlm. 76-77. [↑](#footnote-ref-3)